

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abdul Khakim, *“PENGUPAHAN dalam persepektif HUKUM KETENAGAKERJAAN INDONESIA”*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2016)
- Abdul R Budiono, *“Hukum Perburuhan”*, (Jakarta: PT. Indeks, 2011)
- Aloysius Uwiyono, *et all, “Asas – Asas Hukum Perburuhan”*, (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2020)
- Ari Hermawan, *“Penyelesaian Sengketa Hubungan Industrial”* (Yogyakarta: UII Press, 2018)
- F.X Djumaldji, *“Perjanjian Kerja”*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010)
- Fajar Sugianto, *“Hukum Ketenagakerjaan Indonesia”*, (Surabaya: R.A.De.Rozarie, 2018)
- Imam Soepomo, *“Pengantar Hukum Perburuhan”* (Jakarta: Jambatan, 1983)
- Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *“PERIKATAN YANG LAHIR dari PERJANJIAN”*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2014)
- Kementerian Kesehatan, *“Pedoman COVID REV-5,” Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Coronavirus Disease (COVID-19) Revisi ke-5*, (Jakarta: Kementerian Kesehatan, 2020)
- Lalu Husni, *“PENGANTAR HUKUM KETENAGAKERJAAN”*, (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2020)
- _____, *“Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Melalui Pengadilan & Di Luar Pengadilan”* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007)
- Muhammad Sadi Is dan Sobandi, *“HUKUM KETENAGAKERJAAN DI INDONESIA”*, (Jakarta: Kencana, 2020)
- Nindry Sulistya Widiastani, *“Pengantar Hukum Perburuhan Pasca Undang – Undang Cipta Kerja”*, (Yogyakarta: PT Kanisius, 2022)
- Rahmat S S Soemadipradja, *“Penjelasan Hukum Tentang Keadaan Memaksa”*, (Jakarta: National Legal Reform Program, 2010)
- Satijipto Raharjo, *“Ilmu Hukum”*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. 2000)
- Soerjono Soekanto, *“Pengantar Penelitian Hukum”*, (Jakarta; UI Press. 1984)
- Universitas Pelita Harapan, *“Standar Operasional Prosedur (SOP) Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa”*, (Tangerang: Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, 2021)

PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN

- Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Kitab Undang – Undang Hukum Perdata.
Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39)

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4356)

Undang - Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723 Tahun 2007)

Undang – Undang No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573 Tahun 2020)

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan.(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 237 Tahun 2015, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5747)

Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2020, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6487)

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2021, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6647)

Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2021, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6648)

Keputusan Presiden No. 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19. 2020

Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non-Alam penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID 19). 2020

Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/247/2020 tahun 2020 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Coronavirus Disease 2019 (COVID-19). 2020

Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 104 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Hubungan Kerja Selama Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19). 2021

Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 33 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 5503 Tahun 2020)

Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor M/3/HK.04/III/2020 tentang Pelindungan Pekerja/buruh dan Kelangsungan Usaha Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulan Covid-19. 2020

JURNAL

Muhammad Irfan, *et. all*, “Konsep Asas No Work No Pay Terhadap Pekerja Oleh

- Perusahaan Terdampak Pandemi Covid-19”, Jurnal Komunikasi Hukum Vol. 7, Agustus 2021. DOI: <https://doi.org/10.23887/jkh.v7i2.37984>
- Ni Komang Rosi Triana Ayu Nuratih, *et. all*, “Tanggung Jawab Pemerintah Terhadap Penanggulangan Covid-19 Dalam Rangka Pelayanan Medis Di Rumah Sakit“, Jurnal Prefefensi Hukum Vol.2 No.2, Juli 2021. DOI: <https://doi.org/10.22225/jph.2.2.3317.248-253>
- Oswar Mungkasa, “Bekerja Dari Rumah (*Working From Home/WFH*): Menuju Tatanan Baru Era Pandemi COVID 19 “, The Indonesian Journal of Development Planning Volume IV No.2, Juni 2020. DOI: <https://doi.org/10.36574/jpp.v4i2.119>
- Putri Diana Sampe dan Johnson Dongoran “Dampak Pemotongan Gaji Pada Perusahaan dan Pada Karyawan Selama Masa Pandemic Covid-19”, Jurnal Penelitian dan Pengembangan Sains dan Humaniora Vol. 5 No.3, Oktober 2021. DOI: <https://doi.org/10.23887/jppsh.v5i3.38584>
- Putu Bagus Tutuan Aris Kaya, Ni Ketut Supasti Dharmawan, “Kajian Force Majeure Terkait Pemenuhan Prestasi Perjanjiann Komersial Pasca Penetapan Covid-19 Sebagai Bencana Nasional”, Kertha Semaya: Jurnal Ilmu Hukum, Volume 8 No 6, Juni 2020. DOI: <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/60631>
- Rizka Khalida Utami, *et. All* “Hak dan Kewajiban Pekerja Bagi Karyawan Yang Dirumahkan Akibat Dari Pandemi Covid-19”, Journal of Lex Generalis (JLG), Vol. 2 No. 7, Juli 2021. DOI: <https://doi.org/10.52103/jlg.v2i7>
- Soehardi, *et all* “PENGARUH PANDEMIK COVID-19 TERHADAP WISATAWAN MANCANEGERA DAN NUSANTARA SERTA KARYAWAN PERUSAHAAN PENERBANGAN DI INDONESIA”, Jurnal Ilmiah Manajemen Ubhara: Volume 2 No 2, Oktober 2020. DOI: <http://dx.doi.org/10.31599/jmu.v2i2.769>
- Yetniwati Y “Pengaturan Upah Berdasarkan Prinsip Keadilan”, Mimbar Hukum: Volume 29 No 1, Februari 2017. DOI: [10.22146/jmh.16677](https://doi.org/10.22146/jmh.16677)

HASIL PENELITIAN

- Andi Manaf Nuzulul Manan, “IMPLEMENTASI PASAL 27 AYAT (2) UUD 1945 DI KABUPATEN INDRAGIRI HILIR”. Tesis, D.I Yogyakarta: Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2007
- Andria Marchelia “PEMOTONGAN UPAH SECARA SEPIHAK OLEH PERUSAHAAN DENGAN ALASAN PANDEMI COVID-19 DITINJAU DARI UNDANG – UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 2003”. Skripsi, Jawa Timur: Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "VETERAN" Jawa Timur, 2021
- Ayun Kencana Rupi, “Perlindungan hukum terhadap karyawan akibat pemutusan hubungan kerja secara sepihak dengan alasan force majeure pandemi covid-19”,

Skripsi, Tangerang: Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, 2021

Olga Tasia Lorent, “*Akibat Hukum Force Majeure Pada Masa Pandemi Corona Virus Disease (Covid-19) Dalam Perjanjian Kredit Perbankan*”, Skripsi, Jawa Timur: Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang, 2021

Patricia Pascalina Erica Santoso, “*tinjauan yuridis terhadap pemotongan upah pekerja pada masa pandemi covid-19 menurut undang-undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan dan undang-undang cipta kerja nomor 11 tahun 2020*”, Skripsi, Surabaya: Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan Surabaya, 2021

Risky Nandawati, “*Pemotongan Gaji Pekerja Oleh Perusahaan Yang Terkena Dampak Pandemi Covid-19 (Studi Di Kota Mataram)*”. Jurnal Ilmiah, Mataram: Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Mataram, 2021

WEBSITE INTERNET

Center for Accounting Studies Unpad, “*rekomendasi manajemen kas pada entitas bisnis akibat pandemic covid 19*”. <https://feb.unpad.ac.id/rekomendasi-manajemen-kas-pada-entitas-bisnis-akibat-pandemi-covid-19/>, diakses pada tanggal 2 februari 2022

KemenKopUKM, “*Pengusaha dan Pekerja Wajib Memahami UU Ketenagakerjaan*”, <https://smesta.kemenkopukm.go.id/pengusaha-dan-pekerja-wajib-memahami-uu-ketenagakerjaan/> diakses pada tanggal 13 Oktober 2022

Muhammad Teguh Pangestu, “*Covid-19 sebagai alasan force majeure dalam perjanjian dan implikasinya terhadap perjanjian*”. <https://law.uui.ac.id/blog/2020/06/17/covid-19-sebagai-alasan-force-majeure-dalam-perjanjian-dan-implikasinya-terhadap-perjanjian/> Diakses pada tanggal 19 Juli 2022

Mutia Fauzia, “*survei Jobstreet: 43 persen pekerja gajinya dipangkas*”. <https://money.kompas.com/read/2020/10/07/160300826/survei-jobstreet-selama-pandemi-43-persen-pekerja-gajinya-dipangkas->, diakses pada tanggal 2 februari 2022

Okto Vierten Masrel, “*Bekerja dari Rumah (Work From Home) Dari Sudut Pandang Unit Kepatuhan Internal*”. <https://www.djknkemenkeu.go.id/artikel/baca/13014/Bekerja-dari-Rumah-Work-From-Home-Dari-Sudut-Pandang-Unit-Kepatuhan-Internal.html> diakses pada tanggal 15 Juli 2022

Rahayu Subekti, “*Lion Air Group Potong Gaji Karyawan*”. <https://www.republika.co.id/berita/qcu74s383/lion-air-group-potong-gaji-karyawan>, diakses pada tanggal 18 Juli 2022

- Rivan Dwiastono, “*Pemotongan Gaji Hingga PHK Sepihak, Industri Media Terseok-seok Di Tengah Pandemi*”. <https://www.voaindonesia.com/a/pemotongan-gaji-hingga-phk-sepihak-industri-media-terseok-seok-di-tengah-pandemi/5536743.html> diakses pada tanggal 5 September 2022
- Selvi Mayasari, “*ini rincian gaji karyawan Garuda Indonesia (GIAA) setelah pemotongan 50%*”. <https://industri.kontan.co.id/news/ini-rincian-gaji-karyawan-garuda-indonesia-giaa-setelah-pemotongan-50>, diakses pada tanggal 2 februari 2022
- Trio Hamdani, “*Duh Kebangetan Masih Ada Pengusaha Potong Gaji Karyawan Sepihak*”. <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-5694380/duh-kebangetan-masih-ada-pengusaha-potong-gaji-karyawan-sepihak> diakses pada tanggal 5 September 2022

